

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Situasi masa revolusi dan kondisi dunia internasional membentuk para pemimpin sentral Republik Indonesia terpecah mengenai berbagai aspek dari pandangan dan persepsi mengenai Republik Indonesia dan dunia. Perpecahan ini menjadi batu penghalang bagi pimpinan pemerintahan dalam melawan kembalinya penjajahan Belanda. Munculnya oposisi domestik yang mengakibatkan jatuhnya kabinet dan persaingan elit politik yang terpecah dalam garis politik dan ideologi menjadi peluang Belanda untuk melicinkan tujuannya.

Semenjak tahun 1946 pimpinan tertinggi pemerintahan dipegang oleh pasangan Sutan Syahrir dengan Mr. Amir Syarifuddin dan pasangan Ir. Sukarno dengan Drs. Mohammad Hatta yang mendukung politik diplomasi Sutan Syahrir. Sebaliknya politik diplomasi ini ditentang oleh kelompok Tan Malaka dengan Jemderal Sudirman yang condong kepada garis politik keras. Maka pada proses diplomasi pertama dengan Belanda mengenai Persetujuan Linggarjati pasangan Tan Malaka dengan Jenderal Sudirman menjadi oposisi terhadap kebijakan Sutan Syahrir.

Tidak ada jalan lain bagi presiden pada waktu itu untuk mengatasi pertentangan partai politik, kecuali menunjuk Wakil Presiden Mohammad Hatta membentuk kabinet presidensial yang baru, yang bebas dari ikatan partai. Mengingat kekuatan Dwitunggal di dalam rakyat yang besar dapat memungkinkan menyelesaikan kekacauan yang terjadi. Pembentukan suatu kabinet presidensial yang bersifat nasional dan mencakup semua partai, tampaknya

merupakan satu - satunya jalan yang cepat untuk menciptakan pimpinan kuat yang dibutuhkan. Tindakan ini untuk mengisi kekosongan secepatnya pasca mundurnya Mr. Amir Syarifuddin. Maka pada 29 Januari 1948, Presiden Soekarno mengangkat Wakil Presiden Mohammad Hatta menjadi perdana menteri.

Pembentukan sebuah kabinet yang kuat dalam menjalankan pemerintahan tidak lepas dari faktor historis, pemegang kepemimpinan, sistem pemerintahan dan kondisi politik saat itu. Perlu adanya perubahan atas cara penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya. Jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin memberikan peluang Dwitunggal untuk memanfaatkan kepemimpinannya untuk merubah kondisi diatas. Secara historis bentuk pemerintahan parlementer memancing adanya kekuatan dalam golongan tertentu sehingga dengan mudah dapat menggulingkan kabinet, ditambah pula kepemimpinan yang sangat lemah. Kondisi politik dengan maraknya persaingan antar golongan yang menganut ideologi tertentu menambah kompleks permasalahan yang ada. Maka sangatlah tepat bahwa masa ini perlu adanya pemimpin yang kuat untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada menuju pada tujuan nasional yaitu pengakuan kedaulatan.

Komposisi menteri yang bertugas pada Kabinet Hatta I tidak hanya didasarkan pada perimbangan partai tetapi lebih pada keahliannya dalam menjalankan tugas, tidak jarang tokoh nonpartai masuk didalamnya seperti Ir. Juanda, Sultan Hamengkubuwono IX dan Kusnan. Pada tanggal 16 Februari 1948, Perdana Menteri Hatta berpidato di muka sidang BP KNIP untuk menjelaskan pokok - pokok kebijakan politiknya dalam kabinet presidensil. Adapun bunyi

program pemerintah yaitu menyelenggarakan persetujuan Renville dan terus berunding atas dasar - dasar yang telah disepakati, mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat, mengadakan rasionalisasi ke dalam, dan pembangunan. Tujuan awal yang harus dicapai adalah kedaulatan mutlak dari Belanda dengan menyelenggarakan Persetujuan Renville guna tercapainya Negara Indonesia Serikat yang berdaulat.

Penyelenggaraan program kerja tidak lepas dari kesukaran dan kesulitan yang terjadi waktu itu. Hal ini didasarkan pada perkembangan kondisi dalam negeri dan dunia internasional. Mengenai kondisi dalam negeri terutama terjadi kebuntuan dalam penyelenggaraan Persetujuan Renville, Peristiwa Pemberontakan PKI di Madiun dan Agresi Militer Belanda II. Dalam hal pengaruh dari dunia internasional adalah munculnya dua negara adikuasa yang saling mempengaruhi. Yang patut dipahami adalah bahwa kondisi dalam negeri dan dunia internasional dapat dimanfaatkan Kabinet Hatta I dalam mencapai tujuan utamanya yaitu pengakuan kedaulatan.

Pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda memberikan peluang Republik Indonesia untuk mendapat simpati dunia. Peristiwa pemberontakan PKI di Madiun memberikan kepercayaan Amerika Serikat selaku negara adidaya untuk berbalik mendukung Republik Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB. Agresi Militer Belanda II dengan sendirinya menjadi sebuah titik balik kekalahan diplomasi Belanda di dunia internasional. Belum lagi kondisi dunia internasional di belahan Eropa dan Asia sebagai perebutan Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Pasca Perang Dunia II fokus Amerika Serikat tertuju pada

Eropa dikarenakan adanya kemungkinan besar kemunculan komunis, setelah perpecahan komunis di Uni Soviet dan Cina barulah Amerika Serikat berpaling ke Asia sebagai tujuan politik ideologinya. Berbeda dengan Uni Soviet dimana lebih memanfaatkan peluang anti penjajahan untuk merebut hati negara - negara yang masih terjajah seperti Indonesia dan negara yang baru merdeka.

Keberhasilan Kabinet Hatta I dalam menjalankan program kerja dengan pencapaian kedaulatan tidak lepas dari strategi yang digunakan masa itu. Menurut William D. Coplin terdapat empat indikator yang dapat dipakai untuk memahami perilaku politik luar negeri. Konteks internasional, para pemegang kebijakan, ekonomi militer dan kondisi politik dalam negeri menjadi indikator penting dalam keberhasilan Kabinet Hatta I.

Pendirian yang teguh atas kondisi dunia yang bipolar dan penentuan sikap sendiri atas dua ideologi itu menjadi sebuah sikap yang sangat tepat. Penentuan sikap sendiri bukan berarti menjauhi dua ideologi yang sedang bersaing tetapi Drs. Mohammad Hatta memanfaatkan kondisi itu untuk tujuan nasional. Peran Dwitunggal memang tidak diragukan lagi legalitasnya, salah satu contohnya yaitu pada sidang kabinet darurat tanggal 19 Desember 1948 terbukti bahwa keputusan untuk tinggal di kota dan akhirnya menjadi tawanan perang berujung pada simpati negara - negara anggota PBB terhadap sikap Belanda. Melalui berbagai peristiwa dalam negeri dan didukung kebijakan program kerja Kabinet Hatta I berupa rasionalisasi dan reorganisasi menjadikan Angkatan Perang Republik Indonesia menjadi lebih terkoordinir, efisien, dan diakui di dunia internasional.

Setelah Agresi Militer Belanda II berakhir, pemimpin Republik Indonesia melanjutkan kembali perundingan dengan Belanda. Belanda duduk bersama dengan Republik Indonesia untuk membentuk Negara Indonesia Serikat dalam Konferensi Meja Bundar. Salah satu keputusannya adalah Republik Indonesia akan menjadi Negara Bagian disamping 14 Negara Bagian lain bentukan Belanda. Tanggal 27 Desember 1949 Pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Dengan berjalannya waktu negara boneka buatan Belanda membubarkan diri atau dibubarkan oleh rakyatnya. Pada tanggal 17 Agustus 1950 dinyatakan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masa Kabinet Hatta I berakhir sebelum pengakuan Pemerintah Belanda atas Republik Indonesia diucapkan, tetapi bangsa Indonesia yang berjuang untuk mendapatkan kedaulatan dapat menikmati kemudian. Sampailah perjuangan revolusi Indonesia pada titik pencapaian kedaulatan. Persolan mengenai hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet, perkembangan PKI di Indonesia, status Irian Barat, dan sistem pemerintahan dengan dinamika politik yang terjadi menjadi persoalan tersendiri bagi NKRI dalam menjalankan pemerintahan berikutnya.